

ANALISIS FRAMING MEDIA ONLINE REPUBLIKA.CO.ID DAN KOMPAS.COM TERHADAP SIKAP B.O.P (BOARD OF PEACE) DALAM KASUS GENOSIDA PALESTINA 2026

Farikana Adilla¹, Ade Irfan², Mochammad Mirza³

farikanaadila03@gmail.com¹, airfan@unis.ac.id², m_mirza@unis.ac.id³

Universitas Islam Syekh Yusuf

ABSTRAK

Eskalasi konflik Israel-Palestina di Jalur Gaza sejak 2023 hingga 2026 menimbulkan krisis kemanusiaan besar dan tuduhan genosida dari komunitas internasional. Sebagai respons, dibentuk forum Board of Peace (BoP) yang turut diikuti Indonesia, namun keberadaannya menuai pro-kontra karena dinilai berpotensi menjadi alat kepentingan politik negara besar dan belum tegas menekan Israel. Perdebatan ini banyak dibingkai oleh media massa, termasuk Republika.co.id sebagai media dengan identitas keislaman kuat yang konsisten mengangkat isu Palestina. Penelitian ini menganalisis bagaimana Republika.co.id membingkai sikap BoP dalam pemberitaan genosida Palestina menggunakan model framing Robert N. Entman (define problems, diagnose causes, make moral judgement, suggest remedies). Hasil awal menunjukkan Republika.co.id cenderung mempertanyakan efektivitas dan keberpihakan BoP, dengan menonjolkan aspek kemanusiaan serta kekhawatiran bahwa forum tersebut menggeser fokus dari kemerdekaan Palestina ke kepentingan politik global.

Kata Kunci: Analisis Framing, Republika.Co.Id, Board Of Peace, Genosida Palestina, Robert N. Entman.

ABSTRACT

The escalation of the Israeli-Palestinian conflict in the Gaza Strip between 2023 and 2026 has triggered a major humanitarian crisis and allegations of genocide from the international community. In response, the Board of Peace (BoP) forum was established with Indonesia participating yet its existence has sparked controversy; critics argue it risks becoming a tool for the political interests of major powers and has failed to exert firm pressure on Israel. This debate has been extensively framed by mass media, including Republika.co.id, an outlet with a strong Islamic identity that consistently highlights the Palestinian cause. This study analyzes how Republika.co.id frames the BoP's stance regarding the genocide in Palestine, utilizing Robert N. Entman's framing model (defining problems, diagnosing causes, making moral judgments, and suggesting remedies). Preliminary findings indicate that Republika.co.id tends to question the BoP's effectiveness and impartiality, emphasizing humanitarian concerns and the apprehension that the forum shifts the focus away from Palestinian independence toward global political interests.

Keywords: Framing Analysis, Republika.Co.Id, Board Of Peace, Palestinian Genocide, Robert N. Entman.

PENDAHULUAN

Konflik Palestina dan Israel merupakan salah satu konflik internasional yang sangat Panjang dan kompleks dalam Sejarah dunia modern. Konflik ini tidak hanya berkaitan dengan perebutan wilayah, akan tetapi menyangkut juga persoalan kemanusiaan, hak asasi manusia, politik internasional, dan identitas agama. Dalam beberapa dekade terakhir, konflik tersebut terus menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan krisis kemanusiaan yang semakin memperhatikan, khususnya di jalur Gaza. Situasi ini semakin memburuk pada tahun 2026 ketika intensitas serangan militer Israel terhadap wilayah Palestina meningkat dan menyebabkan ribuan korban sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Berbagai organisasi internasional, aktivis kemanusiaan dan sejumlah negara

menyebut Tindakan tersebut sebagai bentuk genosida terhadap Masyarakat Palestina.

Konflik antara Israel dan Palestina merupakan salah satu konflik terpanjang dan paling kompleks dalam sejarah modern dunia. Konflik ini tidak hanya berkaitan dengan perebutan wilayah, tetapi juga mengandung dimensi politik, ideologis, kemanusiaan, dan agama yang saling bertautan. Sejak pendirian negara Israel pada tahun 1948, berbagai agresi militer terhadap wilayah Palestina telah menimbulkan korban jiwa dan penderitaan yang berkepanjangan. Namun, eskalasi kekerasan yang terjadi sejak Oktober 2023 hingga 2026 di Jalur Gaza menandai fase paling brutal dalam sejarah konflik tersebut, di mana ribuan warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan, menjadi korban serangan militer Israel (Azzahra et al., 2024).

Kasus genosida Palestina menjadi perhatian dunia internasional karena dinilai telah melanggar hukum humaniter internasional dan prinsip hak asasi manusia. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), organisasi kemanusiaan, serta berbagai negara terus menyerukan penghentian serangan dan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Namun, hingga tahun 2026 konflik tersebut belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Kondisi ini menimbulkan berbagai respons dari negara-negara dunia, termasuk Indonesia yang sejak lama dikenal sebagai negara yang konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.

Indonesia mempunyai hubungan emosional dan historis dengan Palestina. Dukungan Indonesia terhadap Palestina telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia. Oleh karena itu, isu Palestina selalu menjadi perhatian besar masyarakat Indonesia, baik dari kalangan pemerintah, organisasi masyarakat, akademisi, maupun media massa. Dukungan tersebut tidak hanya diwujudkan dalam bentuk bantuan kemanusiaan, tetapi juga melalui diplomasi internasional untuk mendorong terciptanya perdamaian dan kemerdekaan Palestina.

Pada tahun 2026, pemerintah Indonesia bergabung dalam sebuah forum internasional bernama Board of Peace (BoP). Forum ini disebut sebagai wadah diplomasi perdamaian internasional yang bertujuan mencari solusi terhadap konflik Gaza dan memperjuangkan penghentian kekerasan di Palestina. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa keterlibatan dalam BoP merupakan bagian dari politik luar negeri bebas aktif dan bentuk komitmen Indonesia dalam membantu penyelesaian konflik kemanusiaan di Palestina. Meskipun demikian, keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian pihak menilai bahwa BoP dapat menjadi sarana diplomasi untuk memperjuangkan perdamaian dan menghentikan genosida di Gaza. Namun, di sisi lain, banyak pihak yang meragukan independensi dan tujuan sebenarnya dari forum tersebut. Kritik muncul karena Board of Peace dianggap berpotensi menjadi alat kepentingan politik negara-negara besar, khususnya Amerika Serikat dan sekutunya. Beberapa tokoh masyarakat, organisasi Islam, dan pengamat politik menilai bahwa forum tersebut justru dapat melemahkan perjuangan kemerdekaan Palestina karena dianggap tidak secara tegas menekan Israel atas tindakan kekerasan yang dilakukan di Gaza.

Perdebatan mengenai sikap Board of Peace terhadap kasus genosida Palestina kemudian menjadi isu yang ramai diberitakan oleh media massa, khususnya media online. Media memiliki peran penting dalam membentuk opini publik melalui cara mereka menyampaikan dan mengonstruksi sebuah peristiwa. Dalam konteks komunikasi massa, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pihak yang menentukan realitas sosial melalui proses seleksi fakta, penonjolan isu, pemilihan narasumber, serta penggunaan bahasa tertentu dalam pemberitaan. Perkembangan teknologi informasi membuat media online menjadi sumber utama masyarakat dalam memperoleh informasi secara cepat dan aktual.

Konflik Palestina-Israel ini menjadi perhatian bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya di Indonesia tetapi juga seluruh dunia. Dengan hal ini menjadi peluang untuk media menjadikan topik konflik Palestina-Israel sebagai topik utama dalam pemberitaan. Media masa memiliki peran penting dalam sebuah pemberitaan sikap Board of peace terhadap genosida di Palestine. Namun, perlu diingat bahwa setiap media mempunyai pendekatan sendiri dalam mengulas sikap Board of peace terhadap Genosida di Palestina. Hal ini dikarenakan media mempunyai agenda tersendiri dalam menonjolkan suatu isu, mengonstruksi berita sesuai dengan bias, ideologi, keberpihakan, dan kepentingan media tersebut. Oleh karena itu, setiap pemberitaan memiliki persepsi sudut pandang (angle) pada berita, penonjolan tersirat pada judul, pemilihan kata, isi berita, pemilihan foto dan tampilan grafis berupa bagan atau lainnya yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan media itu sendiri (Lintang Ayu Pangesti, 2025).

Perkembangan media massa tentu saja mengalami pasang surut, namun para pengelola media tidak tinggal diam. Ketika media yang dikelola mengalami penurunan peminat, karena semakin berkembangnya teknologi dan kemampuan manusia dalam menciptakan sebuah inovasi untuk komunikasi, kini selain media cetak dan media siaran, prilaku media massa pun berkembang pada media online. Media massa mendistribusikan wacana, pengetahuan, dan kegiatan dalam lingkungan publik yang dapat diakses oleh semua orang secara bebas, sukarela, umum, dan terjangkau. Hubungan pengirim-penerima bersifat adil dan menjangkau lebih banyak individu dibandingkan institusi lainnya.

Media di berbagai negara memiliki kecenderungan ideologis yang berbeda-beda. Media Barat, misalnya, sering kali dikritik karena bias terhadap Israel, dengan menyoroti aksi perlawanan Palestina sebagai bentuk kekerasan tanpa memberikan konteks yang memadai tentang pendudukan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama bertahun-tahun. Sebaliknya, media di negara-negara Muslim cenderung lebih menyoroti penderitaan warga sipil Palestina serta kecaman terhadap kebijakan Israel. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberitaan tentang konflik Palestina tidak pernah benar-benar netral, melainkan selalu dipengaruhi oleh kepentingan politik, budaya, dan nilai yang dianut oleh media tersebut (Lintang Ayu Pangesti, 2025).

Media online memiliki kemampuan menyebarkan informasi secara luas dalam waktu singkat, sehingga memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan persepsi masyarakat. Salah satu media online nasional yang aktif memberitakan isu Palestina adalah Republika.co.id. Republika dikenal sebagai media yang sering mengangkat isu-isu Islam, kemanusiaan, dan politik internasional, khususnya terkait Palestina. Dalam pemberitaannya mengenai Board of Peace dan konflik Palestina, Republika.co.id terlihat memberikan perhatian besar terhadap aspek kemanusiaan dan penderitaan rakyat Palestina. Beberapa berita Republika menampilkan kritik terhadap sikap Board of Peace yang dianggap belum sepenuhnya berpihak kepada perjuangan kemerdekaan Palestina. Salah satu berita berjudul “BoP Gaza: Tetap Fokus Penghentian Genosida dan Kemerdekaan Palestina”



Gambar 1 Screenshoot Berita Dari Republika.co.id

menyoroti pentingnya penghentian genosida serta kekhawatiran bahwa tersebut dapat menggeser fokus perjuangan Palestina dari kemerdekaan menuju kepentingan politik global tertentu. Selain itu, artikel “KTT BoP dan Masa Depan Palestina”



Gambar 2 Screenshoot Berita Dari Republika.co.id

juga memperlihatkan bagaimana Republika membingkai Board of Peace sebagai forum yang masih dipertanyakan efektivitas dan keberpihakannya terhadap Palestina. Dalam berita tersebut, Republika menampilkan pandangan sejumlah tokoh yang menilai bahwa forum tersebut tidak boleh mengabaikan tujuan utama perjuangan rakyat Palestina, yaitu kemerdekaan penuh dan penghentian penjajahan Israel.

Media di berbagai negara memiliki kecenderungan ideologis yang berbeda-beda. Media Barat, misalnya, sering kali dikritik karena bias terhadap Israel, dengan menyoroti aksi perlawanan Palestina sebagai bentuk kekerasan tanpa memberikan konteks yang memadai tentang pendudukan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama bertahun-tahun. Sebaliknya, media di negara-negara Muslim cenderung lebih menyoroti penderitaan warga sipil Palestina serta kecaman terhadap kebijakan Israel. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberitaan tentang konflik Palestina tidak pernah benar-benar netral, melainkan selalu dipengaruhi oleh kepentingan politik, budaya, dan nilai yang dianut oleh media tersebut (Lintang Ayu Pangesti, 2025)

Republika.co.id dalam pemberitaan mengenai Palestina menjadi salah satu media yang menarik untuk dikaji karena isu Palestina memiliki posisi penting dalam pemberitaan yang berkaitan dengan persoalan kemanusiaan, politik internasional, dan dunia Muslim. Dalam naskah pemberitaan yang menjadi perhatian penelitian, Republika.co.id menampilkan isu seperti penghentian kekerasan, penderitaan masyarakat Palestina, kemerdekaan Palestina, serta kritik terhadap kemungkinan pergeseran fokus perjuangan Palestina dalam konteks Board of Peace. Salah satu pemberitaan yang disebut dalam kajian awal adalah “BoP Gaza: Tetap Fokus Penghentian Genosida dan Kemerdekaan Palestina”, sementara pemberitaan “KTT BoP dan Masa Depan Palestina” juga menunjukkan adanya pembahasan mengenai efektivitas dan keberpihakan Board of Peace terhadap Palestina.

Di sisi lain, Kompas.com digunakan sebagai media pembanding untuk melihat bagaimana isu yang sama dikonstruksi dalam pemberitaan media online nasional lainnya. Penempatan Kompas.com sebagai objek penelitian tidak dimaksudkan untuk menganggap bahwa media tersebut memiliki framing tertentu sejak awal, tetapi justru untuk mengidentifikasi secara empiris bagaimana Kompas.com membingkai persoalan Board of Peace dan Palestina melalui berita yang dipilih sebagai objek penelitian. Dengan demikian, kecenderungan framing Kompas.com akan ditentukan berdasarkan hasil analisis terhadap teks berita, bukan berdasarkan asumsi mengenai keberpihakan atau ideologi media.

Pemberitaan media memegang peran kunci dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap konflik ini sebagai suatu isu yang melibatkan sejarah panjang klaim teritorial, agama, dan identitas nasional. Cara media membingkai dan melaporkan konflik dapat memberikan dampak yang signifikan pada pemahaman dan sudut pandang masyarakat.

Media, sebagai pemain utama dalam pembentukan opini publik, memiliki dampak besar dalam membentuk sudut pandang masyarakat terhadap konflik.

Dengan cara media memilih untuk menyajikan informasi, memilih kata-kata, dan menggambarkan peristiwa, dapat terbentuk framing atau kerangka interpretasi tertentu. Apakah media memfokuskan pada aspek-aspek kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia, atau aspek geopolitik, akan mempengaruhi cara masyarakat melihat konflik ini. Dengan berkembangnya media sosial dan teknologi informasi, konflik Israel-Palestina tidak hanya terbatas pada pemberitaan tradisional. Platform media sosial memungkinkan partisipasi langsung dari masyarakat, yang dapat membentuk naratif alternatif dan mendistribusikan informasi secara cepat. Sementara itu, teknologi juga memungkinkan berbagai bentuk propaganda dan disinformasi (Efendi et al., 2025).

Media sebagai pemain utama dalam pembentukan opini publik, memiliki dampak besar dalam membentuk sudut pandang masyarakat terhadap konflik. Dengan cara media memilih untuk menyajikan informasi, memilih kata-kata, dan menggambarkan peristiwa, dapat terbentuk framing atau kerangka interpretasi tertentu (Dianto 2022). Apakah media memfokuskan pada aspek-aspek kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia, atau aspek geopolitik, akan mempengaruhi cara masyarakat melihat konflik ini. Pemberitaan media online seperti Republika.co.id menjadi menarik untuk dianalisis karena platform ini memiliki identitas yang kuat sebagai media Islam yang menekankan nilai kemanusiaan, keadilan, dan solidaritas terhadap dunia Muslim. Sejak awal berdirinya, [Republika](http://Republika.co.id) telah menempatkan isu Palestina sebagai salah satu fokus liputan yang konsisten. Dalam setiap eskalasi konflik, [Republika](http://Republika.co.id) selalu menghadirkan narasi yang mengedepankan sisi kemanusiaan dan keadilan bagi rakyat Palestina.

Republika.co.id menjadi salah satu media online yang konsisten mengangkat isu-isu Palestina. Sebagai media yang memiliki latar belakang dan identitas keislaman, Republika.co.id tidak hanya menyoroti konflik Palestina dari sisi politik, tetapi juga dari sisi moral dan kemanusiaan. Dalam berbagai pemberitaannya, Republika.co.id kerap menampilkan persoalan penderitaan warga sipil Palestina, kecaman terhadap tindakan yang dianggap merugikan masyarakat Palestina, serta seruan terhadap pentingnya kemerdekaan dan solidaritas kemanusiaan. Karakteristik tersebut menjadikan Republika.co.id relevan untuk dikaji dalam melihat bagaimana media mengonstruksi pemberitaan mengenai sikap Board of Peace (BoP) dalam kasus Palestina.

Di sisi lain, Kompas.com digunakan sebagai media pembanding untuk melihat bagaimana isu yang sama dikonstruksi oleh media online nasional lainnya. Penempatan Kompas.com sebagai objek penelitian tidak dimaksudkan untuk menganggap bahwa media tersebut memiliki framing tertentu sejak awal, tetapi untuk mengidentifikasi secara empiris bagaimana Kompas.com membingkai persoalan Board of Peace dan Palestina melalui berita yang dipilih sebagai objek penelitian. Dengan demikian, kecenderungan framing Kompas.com akan ditentukan berdasarkan hasil analisis terhadap teks berita, bukan berdasarkan asumsi mengenai keberpihakan, ideologi, atau karakteristik tertentu dari media tersebut.

Pemilihan Republika.co.id dan Kompas.com sebagai objek penelitian didasarkan pada kebutuhan untuk melihat kemungkinan adanya persamaan dan perbedaan dalam mengonstruksi isu Board of Peace dan kasus Palestina. Peristiwa yang sama dapat diberitakan dengan penekanan yang berbeda, baik melalui pemilihan judul, penggunaan istilah, pemilihan narasumber, penyajian fakta, maupun penentuan sudut pandang pemberitaan. Oleh karena itu, perbandingan kedua media menjadi penting untuk mengetahui bagaimana masing-masing media mendefinisikan persoalan, menentukan pihak yang dianggap sebagai penyebab, memberikan penilaian terhadap aktor maupun peristiwa, serta

menawarkan penyelesaian terhadap persoalan yang diberitakan.

Dalam konteks ini, media memiliki peran penting sebagai sarana kontrol sosial terhadap berbagai inisiatif dan lembaga internasional yang terlibat dalam upaya penyelesaian konflik Palestina, termasuk Board of Peace (BoP). Media dapat menyoroti dinamika, kepentingan, serta berbagai perdebatan yang berkaitan dengan keberadaan forum tersebut, sekaligus membangun wacana publik mengenai peran dan sikap Board of Peace terhadap persoalan Palestina. *Republika.co.id* dan *Kompas.com*, sebagai media online yang memberitakan isu tersebut, memiliki posisi penting dalam menyampaikan informasi kepada khalayak sekaligus mengonstruksi realitas melalui proses seleksi dan penonjolan fakta dalam pemberitaan (Jolanda Olivia & Setiawan, 2023).

Teori analisis framing yang dikemukakan oleh Robert N. Entman digunakan sebagai landasan analisis untuk mengetahui bagaimana media menyeleksi dan menonjolkan aspek-aspek tertentu dari suatu realitas. Entman menjelaskan empat fungsi utama dalam proses framing, yaitu *define problems* (pendefinisian masalah), *diagnose causes* (penentuan penyebab masalah), *make moral judgement* (pemberian penilaian moral), dan *suggest remedies* (penawaran solusi). Keempat elemen tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana suatu media membangun kerangka interpretasi tertentu terhadap peristiwa yang diberitakan.

Melalui strategi pembingkai berita tertentu, media dapat memengaruhi cara khalayak memahami kredibilitas, legitimasi, peran, dan keberpihakan suatu aktor atau lembaga. Dalam penelitian ini, perhatian diarahkan pada bagaimana *Republika.co.id* dan *Kompas.com* mengonstruksi sikap Board of Peace dalam kasus Palestina. Penelitian tidak berangkat dari anggapan bahwa salah satu media lebih berpihak atau memiliki framing tertentu, melainkan berusaha menemukan kecenderungan tersebut berdasarkan hasil analisis terhadap teks berita yang menjadi objek penelitian.

Model Robert N. Entman menawarkan kerangka analisis yang sistematis untuk memahami bagaimana media menyeleksi, menonjolkan, dan menafsirkan aspek-aspek tertentu dari suatu peristiwa guna membentuk makna tertentu bagi khalayak. Melalui penerapan empat elemen utama framing, yaitu *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgement*, dan *suggest remedies*, penelitian ini membantu memetakan bagaimana *Republika.co.id* membingkai sikap Board of Peace (B.O.P), menentukan aktor yang dianggap berperan dalam konflik Palestina, menegaskan nilai-nilai moral yang dikedepankan dalam pemberitaan, serta menawarkan solusi atau rekomendasi terkait penyelesaian konflik dan krisis kemanusiaan yang terjadi. Analisis ini diharapkan dapat mengungkap pola naratif yang tidak hanya mencerminkan kebijakan redaksional media, tetapi juga ideologi, nilai, dan perspektif yang melekat dalam konstruksi pemberitaan *Republika.co.id* dan *Kompas.com* terhadap sikap Board of Peace (B.O.P) dalam kasus genosida Palestina tahun 2026.

Media online dapat dipahami sebagai bentuk media massa berbasis teknologi komunikasi dan multimedia (komputer serta internet). Di dalamnya mencakup berbagai platform seperti portal berita, situs web, radio online, televisi daring, dan pers digital dengan karakteristik yang beragam sesuai dengan fitur yang memungkinkan pengguna mengakses serta memanfaatkannya secara interaktif. Dalam konteks ini, pembahasan difokuskan pada Analisis Framing Media Online *Republika.co.id* dan *Kompas.com* terhadap Sikap Board of peace dalam Kasus Genosida Palestina. Kajian ini berfokus pada bagaimana proses pembingkai (framing) dilakukan terhadap suatu peristiwa dalam pemberitaan yang dimuat di portal *Republika.co.id*. Melalui analisis tersebut, dapat diketahui bagaimana wartawan *Republika.co.id* mengonstruksi realitas peristiwa melalui sudut pandang tertentu dan cara penyusunan teks berita yang membentuk makna serta persepsi pembaca terhadap

isu yang diberitakan.

METODE

Metode penelitian ini adalah menggunakan metode analisis framing model Robert N. Entman. Analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Ada dua esensi framing utama, yakni bagaimana peristiwa dimaknai dan bagaimana fakta ditulis. Menurut Eriyanto dalam bukunya yang berjudul *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media* yaitu analisis ini juga digunakan untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media (Eriyanto, 2002: 10).

Model analisis framing Robert N. Entman adalah model yang digunakan untuk menganalisa bagaimana suatu media membingkai suatu peristiwa atau kebijakan tertentu yang menjadi perhatian khalayak. Model Entman menggunakan konsep framing dan berbagai frame substansif tertentu yang biasanya paling tidak dalam empat fungsi dasar yaitu: Mendefinisikan Masalah, Identifikasi Penyebab, penyampaian penilaian moral, dan tawaran solusi. Penelitian ini menggunakan metode analisis framing model Robert N. Entman dengan menggunakan pendekatan konstruktivis. Penelitian ini menganalisis pemberitaan tentang sikap Media Online *Republika.co.id* terhadap Sikap Board of peace dalam Kasus Genosida Palestina 2026 (Rachmat Kriyantono, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Berdasarkan Hasil analisis yang dilakukan peneliti terhadap lima belas berita yang diterbitkan oleh media *Republika.co.id* dan *Kompas.com* mengenai sikap Board Of Peace (B.O.P) dalam kasus genosida Palestina Pada bulan Januari-Mei 2026 ditemukan adanya pola framing yang relative konsisten dalam menyampaikan sebuah informasi kepada khalayak. Melalui analisis framing Robert N. Emant, terlihat bahwa kedua media tidak hanya menyajikan fakta mengenai perkembangan konflik di Palestina, tetapi juga membangun cara pandang tertentu terhadap peran dan sikap Board Of Peace (B.O.P) sebagai suatu lembaga yang dibentuk dengan tujuan menciptakan perdamaian dunia.

Analisis Framing Robert N. Emant memandang bahwa media tidak sekedar menyampaikan suatu realitas, melainkan memilih fakta-fakta tertentu untuk ditonjolkan kepada pembaca. Dalam melakukan proses tersebut, media melakukan seleksi terhadap berbagai peristiwa, narasumber, dan informasi yang dianggap penting, kemudian menyusunnya ke dalam sebuah bingkai berita yang memiliki sudut pandang tertentu. Oleh karena itu, pemberitaan media bukanlah cerminan realitas yang sepenuhnya objektif, melainkan hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh proses jurnalistik, pemilihan sumber berita, serta nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing media.

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan menggunakan empat elemen framing Robert N. Entman, yaitu Define Problems (pendefinisian masalah), Diagnose Causes (memperkirakan penyebab masalah), Make Moral Judgement (membuat penilaian moral), dan Treatment Recommendation (memberikan rekomendasi penyelesaian). Keempat elemen tersebut digunakan untuk mengetahui bagaimana *Republika.co.id* dan *Kompas.com* membingkai berbagai peristiwa yang berkaitan dengan Board of Peace dalam konteks konflik Palestina, khususnya setelah berbagai serangan militer Israel yang terus berlangsung sepanjang Bulan Januari-Mei 2026.

Hasil penelitian dari media *Republika.co.id* secara konsisten menempatkan konflik Palestina sebagai persoalan kemanusiaan yang serius serta menyoroti ketidakmampuan Board of Peace dalam menjalankan fungsi yang diklaim sebagai lembaga penjaga perdamaian dunia. Dalam berbagai pemberitaannya, *Republika.co.id* memberikan ruang

yang cukup besar kepada tokoh-tokoh nasional, organisasi keagamaan, akademisi, maupun pengamat hubungan internasional yang menyampaikan kritik terhadap keberadaan dan efektivitas Board of Peace. Pemilihan narasumber tersebut memperlihatkan kecenderungan media untuk mengarahkan perhatian pembaca pada berbagai kritik terhadap sikap Board of Peace dibandingkan dengan pemberitaan yang menonjolkan keberhasilan atau pembelaan terhadap lembaga tersebut.

Sementara itu, Kompas.com juga membingkai isu Board of Peace dalam konteks konflik Palestina dengan menyoroti persoalan efektivitas, sikap, serta posisi lembaga tersebut dalam upaya penyelesaian konflik. Pemberitaan Kompas.com cenderung menghubungkan keberadaan Board of Peace dengan perkembangan politik internasional dan kepentingan negara-negara yang terlibat dalam konflik Palestina. Dengan demikian, persoalan Board of Peace tidak hanya dipandang sebagai persoalan kelembagaan, tetapi juga berkaitan dengan dinamika politik, diplomasi, serta upaya penyelesaian konflik Palestina.

Selain itu, kedua media sama-sama menggunakan sejumlah diksi yang berkaitan dengan isu kemanusiaan, seperti genosida, penjajahan, pelanggaran HAM, agresi militer, korban sipil, dan krisis kemanusiaan. Penggunaan istilah-istilah tersebut memperkuat konstruksi bahwa konflik Palestina bukan sekadar konflik politik atau militer, melainkan merupakan tragedi kemanusiaan yang membutuhkan perhatian masyarakat internasional. Dalam konteks tersebut, Board of Peace diposisikan sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam menciptakan perdamaian, tetapi dalam pemberitaan kedua media masih ditemukan sorotan terhadap keterbatasan maupun efektivitas lembaga tersebut dalam menangani persoalan Palestina.

Perbedaan framing antara Republika.co.id dan Kompas.com terutama terlihat pada penekanan isu dan pemilihan perspektif pemberitaan. Republika.co.id lebih kuat menonjolkan dimensi kemanusiaan, kritik moral, serta suara tokoh dan organisasi yang mempertanyakan sikap Board of Peace terhadap Palestina. Sementara itu, Kompas.com cenderung memberikan perhatian yang lebih besar terhadap aspek politik, diplomasi, hubungan internasional, serta posisi Board of Peace dalam dinamika penyelesaian konflik Palestina. Meskipun terdapat perbedaan penekanan, kedua media sama-sama menunjukkan bahwa persoalan Palestina merupakan isu yang membutuhkan perhatian dan tindakan nyata dari masyarakat internasional.

Pembahasan ini kemudian diuraikan berdasarkan empat elemen framing Robert N. Entman. Setiap elemen menjelaskan bagaimana Republika.co.id dan Kompas.com mendefinisikan persoalan, menentukan penyebab utama masalah, memberikan penilaian moral terhadap aktor-aktor yang terlibat, serta menawarkan solusi atau rekomendasi penyelesaian sebagaimana tercermin dalam isi pemberitaan. Melalui pembahasan tersebut, diharapkan dapat diketahui secara lebih mendalam bentuk konstruksi realitas yang dibangun oleh kedua media terhadap sikap Board of Peace dalam kasus genosida Palestina pada bulan Januari-Mei 2026

Dengan demikian, pembahasan ini tidak hanya menggambarkan hasil analisis terhadap isi berita, tetapi juga menunjukkan bagaimana proses framing dilakukan oleh Republika.co.id dan Kompas.com sehingga membentuk pemahaman tertentu mengenai posisi Board of Peace dalam konflik Palestina. Perbandingan kedua media tersebut menunjukkan bahwa meskipun memiliki sudut pandang dan penekanan pemberitaan yang berbeda, keduanya sama-sama mengonstruksi isu Board of Peace sebagai bagian dari persoalan yang lebih luas, yaitu konflik Palestina, krisis kemanusiaan, serta tanggung jawab masyarakat internasional dalam mewujudkan perdamaian. Hasil analisis tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk menjelaskan kecenderungan framing kedua media serta relevansinya dengan teori framing Robert N. Entman sebagai landasan analisis dalam

penelitian ini.

1) *Define Problems* (Pendefinisian Masalah) Republika.co.id dan Kompas.com

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan kecenderungan dalam mendefinisikan permasalahan Board of Peace (B.O.P) antara Republika.co.id dan Kompas TV. Dalam konsep framing Robert N. Entman, Define Problems merupakan tahap ketika media menentukan bagaimana suatu peristiwa dipahami dan ditempatkan sebagai suatu persoalan. Dengan demikian, perbedaan dalam mendefinisikan masalah menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang media dalam melihat realitas yang sama.

Pada Republika.co.id, berdasarkan analisis terhadap 15 berita periode Januari–Mei 2026, permasalahan B.O.P lebih banyak didefinisikan sebagai persoalan legitimasi, kredibilitas, dan efektivitas lembaga perdamaian tersebut dalam menyelesaikan konflik Palestina. Republika.co.id secara berulang menonjolkan kontroversi pembentukan B.O.P, dominasi Donald Trump sebagai ketua, keterlibatan Israel, tidak adanya representasi Palestina yang setara, serta kekhawatiran bahwa B.O.P dapat menggeser atau melemahkan mekanisme penyelesaian konflik yang berada dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oleh karena itu, persoalan yang ditonjolkan bukan sekadar mengenai pembentukan lembaga perdamaian baru, tetapi mengenai apakah B.O.P memiliki legitimasi dan kemampuan untuk menghasilkan perdamaian yang berkeadilan bagi Palestina.

Selain itu, Republika.co.id mendefinisikan keterlibatan Indonesia dalam B.O.P sebagai persoalan yang perlu dipertimbangkan secara kritis. Keanggotaan Indonesia tidak hanya ditempatkan sebagai keputusan politik luar negeri, tetapi juga dikaitkan dengan konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Hal tersebut terlihat dari munculnya pandangan MUI, Muhammadiyah, akademisi, DPR, dan kelompok masyarakat sipil yang mempertanyakan manfaat keterlibatan Indonesia apabila BoP tidak mampu menghentikan agresi Israel dan memberikan jaminan terhadap kemerdekaan Palestina. Dengan demikian, Define Problems Republika.co.id mengarah pada konstruksi bahwa persoalan utama B.O.P adalah krisis legitimasi dan efektivitas dalam menjalankan fungsi perdamaian, sekaligus dilema mengenai posisi Indonesia di dalamnya.

Sementara itu, hasil penelitian terhadap Kompas TV menunjukkan kecenderungan yang berbeda. Kompas TV lebih banyak mendefinisikan persoalan B.O.P melalui posisi dan kepentingan strategis Indonesia dalam diplomasi internasional. Keanggotaan Indonesia dipandang sebagai sebuah pilihan strategis yang dapat memberikan ruang bagi Indonesia untuk terlibat secara langsung dalam proses penyelesaian konflik Palestina. Dengan berada di dalam B.O.P, Indonesia dinilai memiliki kesempatan untuk menyampaikan kepentingan Palestina dan memengaruhi proses pengambilan keputusan, sehingga Indonesia tidak hanya berada di luar arena diplomasi.

Dalam pembedaan tersebut, persoalan yang muncul bukan terutama mengenai apakah B.O.P memiliki legitimasi atau tidak, tetapi mengenai bagaimana Indonesia memanfaatkan keanggotaannya untuk memperjuangkan kepentingan Palestina. Hal ini memperlihatkan bahwa Kompas TV lebih menonjolkan aspek peluang dan strategi diplomasi Indonesia. Keterlibatan dalam BoP dapat dipahami sebagai instrumen politik luar negeri untuk menjaga ruang pengaruh Indonesia dalam proses perdamaian Palestina.

Meskipun demikian, Kompas TV tidak sepenuhnya menghilangkan sisi problematis dari keanggotaan Indonesia. Keterlibatan tersebut juga diposisikan sebagai dilema karena B.O.P diinisiasi oleh Donald Trump dan memiliki hubungan dengan kepentingan Amerika Serikat dalam penyelesaian konflik Palestina. Oleh karena itu, terdapat pertanyaan mengenai sejauh mana Indonesia dapat mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas aktif sekaligus tetap memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui forum tersebut.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kedua media membangun realitas masalah yang berbeda terhadap objek pemberitaan yang sama. *Republika.co.id* lebih menempatkan B.O.P sebagai objek yang perlu dipertanyakan legitimasi dan efektivitasnya, sedangkan Kompas TV lebih menempatkan keterlibatan Indonesia sebagai persoalan strategis yang berkaitan dengan peluang diplomasi dan kepentingan nasional. Dengan kata lain, *Republika.co.id* lebih menekankan pertanyaan mengenai “apakah BoP mampu dan layak menjadi lembaga perdamaian bagi Palestina?”, sedangkan Kompas TV lebih menekankan “bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan keterlibatannya dalam B.O.P untuk memperjuangkan kepentingan Palestina?”

Perbedaan framing tersebut dapat dipahami sebagai bentuk seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari suatu realitas. Dalam konsep Entman, framing bekerja dengan memilih aspek tertentu dari realitas dan membuat aspek tersebut lebih menonjol sehingga membentuk definisi masalah tertentu. Dalam penelitian ini, *Republika.co.id* lebih menonjolkan aspek kontroversi, ketidakadilan, legitimasi, dan efektivitas B.O.P, sedangkan Kompas TV lebih menonjolkan aspek strategi diplomasi, kepentingan nasional, dan ruang pengaruh Indonesia.

Temuan tersebut juga dapat dikaitkan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ivan Dermawan (2026), Didi Permadi (2026), dan Edy Sarwo (2026) mengenai pemberitaan Kompas.com. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP dipahami sebagai langkah strategis agar Indonesia tetap berada dalam arena diplomasi dan dapat berkontribusi terhadap proses perdamaian Palestina. Hal tersebut memiliki kesamaan dengan kecenderungan framing Kompas TV yang melihat keanggotaan Indonesia tidak semata-mata sebagai bentuk keberpihakan terhadap pihak tertentu, tetapi sebagai ruang diplomasi yang dapat dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan Palestina.

Di sisi lain, temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Firman (2026) yang menjelaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP merupakan arena kontestasi legitimasi konstitusional, bukan hanya pilihan diplomatik. Pemerintah membangun legitimasi melalui amanat perdamaian dunia, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, prinsip politik luar negeri bebas aktif, dan strategi *inside to steer*. Dalam konteks tersebut, perbedaan framing antara *Republika.co.id* dan Kompas TV menunjukkan bahwa keterlibatan Indonesia memang berada pada persimpangan antara kepentingan strategis dan tuntutan moral terhadap perjuangan Palestina.

Dengan demikian, pada elemen *Define Problems*, *Republika.co.id* cenderung membingkai Board of Peace sebagai persoalan legitimasi dan efektivitas dalam mewujudkan perdamaian serta keadilan bagi Palestina, sedangkan Kompas TV cenderung membingkai keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace sebagai persoalan strategi diplomasi dan kepentingan nasional dalam memperjuangkan Palestina. Meskipun memiliki perbedaan penekanan, kedua media memiliki titik temu bahwa posisi Indonesia merupakan aspek penting dalam penyelesaian konflik Palestina. Perbedaannya terletak pada cara masing-masing media memahami posisi tersebut: *Republika.co.id* lebih kritis terhadap risiko dan konsekuensi keterlibatan Indonesia, sedangkan Kompas TV lebih menonjolkan peluang strategis yang dapat diperoleh Indonesia melalui keterlibatannya dalam B.O.P.

2) *Diagnose Causes (Penyebab Masalah) Republika.co.id dan Kompas.com*

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan dalam cara *Republika.co.id* dan Kompas TV mengonstruksi penyebab permasalahan Board of Peace (B.O.P). Dalam framing Robert N. Entman, *Diagnose Causes* berkaitan dengan bagaimana media mengidentifikasi pihak, aktor, maupun faktor yang dianggap sebagai penyebab munculnya suatu permasalahan. Dengan demikian, perbedaan dalam elemen ini menunjukkan adanya perbedaan dalam menentukan siapa atau apa yang dianggap bertanggung jawab terhadap

persoalan yang diberitakan.

Berdasarkan analisis terhadap 15 berita, Republika.co.id secara konsisten mengidentifikasi penyebab permasalahan BoP melalui dominasi Amerika Serikat dan Donald Trump, tidak adanya representasi Palestina, keterlibatan Israel, berlanjutnya agresi militer Israel, serta lemahnya mekanisme B.O.P dalam menjalankan fungsi perdamaian. Struktur B.O.P yang memberikan kewenangan besar kepada Donald Trump diposisikan sebagai salah satu sumber utama persoalan karena dianggap dapat mengurangi independensi lembaga. Selain itu, tidak adanya Palestina sebagai pihak yang memiliki posisi setara dengan Israel dipahami sebagai bentuk ketidakadilan yang menyebabkan legitimasi B.O.P dipertanyakan.

Dalam pemberitaan Republika.co.id, penyebab persoalan juga tidak berhenti pada struktur B.O.P, tetapi dikaitkan dengan tindakan Israel yang terus melakukan serangan terhadap Gaza meskipun terdapat upaya gencatan senjata dan mekanisme perdamaian. Dengan demikian, Israel ditempatkan sebagai salah satu aktor yang berkontribusi terhadap keberlanjutan konflik, sementara BoP diposisikan sebagai lembaga yang tidak mampu memberikan respons efektif terhadap tindakan tersebut. Pola tersebut memperlihatkan bahwa Republika.co.id cenderung mengonstruksi penyebab masalah secara struktural dan politis dengan menghubungkan antara dominasi aktor besar, ketidakadilan representasi, agresi militer, dan lemahnya institusi perdamaian.

Sementara itu, pada Kompas TV, penyebab permasalahan lebih banyak dikonstruksi melalui dilema keterlibatan Indonesia dalam B.O.P dan pengaruh kepentingan Amerika Serikat dalam pembentukan serta arah kebijakan lembaga tersebut. Donald Trump dan Amerika Serikat diposisikan sebagai aktor penting karena BoP merupakan inisiatif Amerika Serikat dan kepemimpinannya berada di bawah Donald Trump. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai sejauh mana Indonesia dapat mempertahankan kepentingan nasional dan prinsip politik luar negeri bebas aktif ketika berada dalam forum yang memiliki kepentingan strategis Amerika Serikat.

Namun, berbeda dengan Republika.co.id yang cenderung menempatkan dominasi Amerika Serikat sebagai faktor yang melemahkan legitimasi B.O.P, Kompas TV lebih melihat pengaruh tersebut sebagai tantangan yang harus dihadapi Indonesia melalui keterlibatan diplomatik. Artinya, penyebab persoalan tidak semata-mata diletakkan pada keberadaan Amerika Serikat atau Donald Trump, tetapi juga pada bagaimana Indonesia mampu menggunakan ruang yang tersedia di dalam BoP untuk memperjuangkan kepentingan Palestina. Keterlibatan Indonesia dipandang dapat menjadi instrumen untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan dari dalam forum tersebut.

Selain itu, Kompas TV juga menampilkan adanya kekhawatiran bahwa keterlibatan Indonesia dapat menimbulkan konsekuensi terhadap konsistensi politik luar negeri Indonesia. Kekhawatiran tersebut muncul karena Indonesia harus berada dalam forum yang diprakarsai Amerika Serikat, sementara pada saat yang sama Indonesia memiliki komitmen terhadap kemerdekaan Palestina. Dengan demikian, penyebab polemik tidak hanya berasal dari struktur B.O.P, tetapi juga dari adanya ketegangan antara kepentingan strategis Indonesia dan prinsip politik luar negeri Indonesia dalam memperjuangkan Palestina.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Republika.co.id dan Kompas TV memiliki kecenderungan berbeda dalam menentukan sumber persoalan. Republika.co.id lebih banyak menunjuk aktor dan struktur yang berada di dalam B.O.P sebagai penyebab masalah, seperti dominasi Donald Trump, Amerika Serikat, Israel, serta tidak adanya representasi Palestina. Sementara itu, Kompas TV lebih banyak mengarahkan penyebab persoalan pada dilema strategis Indonesia dalam menghadapi pengaruh Amerika Serikat dan kepentingan politik dalam B.O.P.

Dengan demikian, jika *Republika.co.id* cenderung membangun hubungan sebab-akibat bahwa dominasi Amerika Serikat, ketidakadilan representasi, dan agresi Israel menyebabkan B.O.P kehilangan legitimasi serta efektivitasnya, maka Kompas TV cenderung membangun hubungan sebab-akibat bahwa keterlibatan Indonesia dalam B.O.P menimbulkan persoalan karena Indonesia harus menyeimbangkan kepentingan nasional, komitmen terhadap Palestina, dan pengaruh Amerika Serikat. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kedua media tidak hanya berbeda dalam memilih aspek yang ditonjolkan, tetapi juga berbeda dalam menentukan aktor dan faktor yang dianggap menjadi sumber permasalahan.

Temuan pada Kompas TV tersebut dapat dikaitkan dengan penelitian Ivan Dermawan (2026), Didi Permadi (2026), dan Edy Sarwo (2026) yang menunjukkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam forum B.O.P dapat dipahami sebagai strategi untuk mempertahankan posisi Indonesia dalam arena diplomasi internasional. Indonesia dipandang perlu berada di dalam arena agar memiliki ruang untuk memengaruhi proses perdamaian dan memperjuangkan kepentingan Palestina. Hal ini memperkuat temuan penelitian bahwa Kompas TV lebih menempatkan persoalan pada bagaimana Indonesia menghadapi konsekuensi strategis dari keterlibatannya dalam B.O.P.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Firman (2026) yang menjelaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP merupakan arena kontestasi legitimasi konstitusional. Pemerintah membangun pembenaran melalui amanat perdamaian dunia, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, prinsip politik luar negeri bebas aktif, serta strategi *inside to steer*. Dalam konteks *Diagnose Causes*, hal tersebut menunjukkan bahwa polemik B.O.P tidak hanya disebabkan oleh karakteristik lembaganya, tetapi juga oleh adanya perbedaan kepentingan dan pertimbangan antara pemerintah, masyarakat, organisasi keagamaan, serta kelompok politik dalam menentukan sikap Indonesia.

Dengan demikian, pada elemen *Diagnose Causes*, *Republika.co.id* lebih dominan mengonstruksi penyebab masalah melalui dominasi Amerika Serikat dan Donald Trump, keterlibatan Israel, tidak adanya representasi Palestina, agresi Israel, dan kelemahan mekanisme B.O.P. Sementara itu, Kompas TV lebih menekankan pengaruh Amerika Serikat dan Donald Trump serta dilema strategis Indonesia dalam mempertahankan kepentingan nasional dan komitmen terhadap Palestina. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa *Republika.co.id* cenderung menggunakan pendekatan yang lebih kritis terhadap struktur B.O.P, sedangkan Kompas TV lebih menempatkan persoalan dalam perspektif strategi diplomasi Indonesia.

3) Make Moral Judgement (Penilaian Moral) *Republika.co.id* dan Kompas.com

Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan kecenderungan antara *Republika.co.id* dan Kompas TV dalam memberikan penilaian terhadap Board of Peace (B.O.P) dan keterlibatan Indonesia. Dalam model framing Robert N. Entman, *Make Moral Judgement* berkaitan dengan bagaimana media memberikan penilaian terhadap suatu peristiwa, aktor, maupun tindakan berdasarkan nilai atau standar tertentu. Oleh karena itu, penilaian moral yang ditampilkan media dapat menunjukkan nilai yang dianggap penting dalam memahami suatu persoalan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap 15 berita, *Republika.co.id* secara konsisten memberikan penilaian moral dengan menempatkan keadilan, kemanusiaan, hak asasi manusia, hukum internasional, dan kemerdekaan Palestina sebagai dasar utama dalam menilai Board of Peace dan aktor-aktor yang terlibat. Tindakan Israel yang menyerang warga sipil, melanggar gencatan senjata, serta menghambat bantuan kemanusiaan diposisikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan perdamaian. Selain itu, struktur B.O.P yang memberikan kewenangan besar kepada Donald Trump dan

tidak memberikan representasi yang setara kepada Palestina dinilai sebagai kondisi yang tidak mencerminkan prinsip keadilan.

Republika.co.id juga memberikan penilaian moral terhadap keterlibatan Indonesia. Indonesia diposisikan memiliki tanggung jawab moral untuk tetap memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan. Dengan demikian, keikutsertaan Indonesia dalam B.O.P dapat dianggap positif apabila digunakan sebagai sarana untuk memperjuangkan Palestina, tetapi dapat dinilai negatif apabila justru memberikan legitimasi terhadap kepentingan Amerika Serikat atau Israel. Hal tersebut menunjukkan bahwa Republika.co.id menggunakan prinsip “perdamaian yang berkeadilan” sebagai ukuran moral dalam menilai keterlibatan Indonesia.

Sementara itu, hasil analisis 15 berita dari media Kompas TV cenderung membangun penilaian moral dengan menempatkan perdamaian, kepentingan Palestina, tanggung jawab Indonesia, dan konsistensi politik luar negeri bebas aktif sebagai dasar penilaian. Keterlibatan Indonesia dalam B.O.P tidak secara langsung dinilai sebagai tindakan yang salah. Sebaliknya, keikutsertaan tersebut dapat dipandang memiliki nilai positif apabila digunakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina, menghentikan konflik, serta memberikan kontribusi terhadap terciptanya perdamaian di Gaza.

Dalam framing Kompas TV, posisi Indonesia cenderung memperoleh penilaian moral yang relatif positif karena Indonesia dipandang memiliki kepentingan dan tanggung jawab untuk tetap terlibat dalam upaya penyelesaian konflik Palestina. Keberadaan Indonesia di dalam B.O.P dapat dipahami sebagai bentuk usaha untuk tidak berada di luar proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, keterlibatan Indonesia dinilai bukan semata-mata berdasarkan siapa yang membentuk B.O.P, tetapi berdasarkan bagaimana Indonesia menggunakan ruang tersebut untuk memperjuangkan kepentingan Palestina.

Meskipun demikian, Kompas TV tetap memberikan batasan moral terhadap keterlibatan Indonesia. Keanggotaan dalam B.O.P dinilai harus tetap berada dalam koridor kepentingan nasional dan prinsip politik luar negeri Indonesia. Apabila keterlibatan tersebut justru membuat Indonesia mengikuti kepentingan Amerika Serikat atau mengabaikan perjuangan kemerdekaan Palestina, maka keanggotaan tersebut dapat dipertanyakan. Dengan kata lain, Kompas TV memberikan penilaian moral yang bersifat kondisional, yaitu mendukung keterlibatan selama keanggotaan tersebut dapat memberikan manfaat bagi perjuangan Palestina dan perdamaian.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Republika.co.id dan Kompas TV memiliki standar moral yang relatif sama dalam menempatkan kemerdekaan Palestina dan perdamaian sebagai nilai penting, tetapi berbeda dalam memberikan penilaian terhadap strategi yang ditempuh Indonesia. Republika.co.id lebih kritis terhadap potensi B.O.P sebagai lembaga yang dapat memberikan legitimasi terhadap kepentingan Amerika Serikat dan Israel. Sebaliknya, Kompas TV lebih memberikan ruang terhadap kemungkinan bahwa BoP dapat dimanfaatkan Indonesia sebagai instrumen diplomasi untuk memperjuangkan kepentingan Palestina.

Dengan demikian, jika Republika.co.id cenderung membangun penilaian moral bahwa perdamaian tanpa keadilan bagi Palestina merupakan perdamaian yang tidak dapat dibenarkan, Kompas TV lebih menekankan bahwa keterlibatan Indonesia dapat dibenarkan secara moral selama digunakan untuk memperjuangkan perdamaian dan kepentingan Palestina. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penilaian moral kedua media tidak sepenuhnya bertentangan, tetapi memiliki titik tekan yang berbeda. Republika.co.id lebih menonjolkan kritik terhadap struktur dan legitimasi B.O.P, sedangkan Kompas TV lebih menonjolkan tanggung jawab Indonesia untuk memanfaatkan ruang diplomasi yang tersedia.

Temuan tersebut dapat dikaitkan dengan penelitian Firman (2026) yang menjelaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP merupakan arena kontestasi legitimasi konstitusional. Pemerintah membangun pembenaran keterlibatan melalui amanat perdamaian dunia, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, serta prinsip politik luar negeri bebas aktif. Hal tersebut sejalan dengan kecenderungan Kompas TV yang memberikan penilaian moral positif terhadap keterlibatan Indonesia selama keanggotaan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan perdamaian dan memperjuangkan Palestina.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Ivan Dermawan (2026), Didi Permadi (2026), dan Edy Sarwo (2026) yang menunjukkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam forum internasional dipahami sebagai upaya strategis untuk mempertahankan ruang pengaruh Indonesia dalam proses perdamaian Palestina. Dalam konteks Make Moral Judgement, posisi tersebut memperlihatkan bahwa keterlibatan Indonesia tidak selalu dinilai sebagai bentuk kompromi terhadap kepentingan Amerika Serikat, tetapi dapat dipandang sebagai tindakan yang dapat dibenarkan apabila Indonesia tetap mempertahankan prinsip dan kepentingannya terhadap Palestina.

Dengan demikian, pada elemen Make Moral Judgement, Republika.co.id lebih dominan memberikan penilaian moral melalui perspektif keadilan, kemanusiaan, hukum internasional, dan penolakan terhadap penjajahan, sedangkan Kompas TV lebih menekankan tanggung jawab diplomatik Indonesia, perdamaian, kepentingan Palestina, dan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Keduanya sama-sama menempatkan perjuangan Palestina sebagai nilai penting, tetapi Republika.co.id lebih kritis terhadap legitimasi B.O.P, sementara Kompas TV lebih terbuka terhadap kemungkinan pemanfaatan B.O.P sebagai instrumen diplomasi Indonesia

4) Treatment Recommendation (Rekomendasi Penyelesaian) Republika.co.id dan Kompas.com

Hasil penelitian dari Republika.co.id dan Kompas TV sama-sama menempatkan kepentingan Palestina dan terciptanya perdamaian sebagai tujuan utama penyelesaian masalah, tetapi memiliki penekanan yang berbeda dalam menawarkan solusi. Dalam konsep framing Robert N. Entman, Treatment Recommendation menunjukkan bagaimana media memberikan rekomendasi atau jalan keluar terhadap masalah yang sebelumnya telah didefinisikan dan dinilai secara moral.

Hasil dari analisis 15 berita, Republika.co.id secara konsisten menawarkan penyelesaian melalui penghentian agresi Israel, perlindungan warga sipil, penghormatan terhadap hukum internasional, penguatan peran PBB dan OKI, serta reformasi terhadap Board of Peace. Indonesia juga didorong untuk mempertahankan politik luar negeri bebas aktif dan memastikan keterlibatannya dalam B.O.P benar-benar digunakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Apabila B.O.P tidak mampu menjalankan fungsi tersebut, Republika.co.id memberikan ruang bagi Indonesia untuk mempertimbangkan penarikan diri dari keanggotaan.

Sementara itu, hasil analisis 15 berita pada Kompas TV, rekomendasi penyelesaian lebih banyak diarahkan pada pemanfaatan keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace sebagai instrumen diplomasi untuk memperjuangkan kepentingan Palestina. Indonesia tidak secara langsung diarahkan untuk keluar dari B.O.P, tetapi didorong untuk menggunakan posisi tersebut secara aktif agar dapat memengaruhi arah kebijakan dan proses perdamaian dari dalam forum. Keanggotaan Indonesia dipandang sebagai kesempatan untuk mempertahankan ruang diplomasi dan menyampaikan kepentingan Palestina dalam forum internasional.

Dalam konteks tersebut, Kompas TV cenderung menawarkan pendekatan *inside to steer*, yaitu tetap berada di dalam forum sambil mengawal agar kebijakan yang dihasilkan

tidak menyimpang dari kepentingan Palestina dan prinsip politik luar negeri Indonesia. Indonesia dapat memanfaatkan posisi tersebut untuk mendorong penghentian konflik, perlindungan masyarakat sipil, rekonstruksi Gaza, serta terciptanya perdamaian yang mengarah pada kemerdekaan Palestina. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan tidak hanya berupa penolakan terhadap B.O.P, tetapi juga pemanfaatan ruang diplomasi yang tersedia untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan.

Kompas TV juga membingkai bahwa keterlibatan Indonesia perlu disertai dengan batasan dan evaluasi. Indonesia tidak harus mempertahankan keanggotaannya apabila B.O.P tidak memberikan manfaat bagi perjuangan Palestina atau justru membawa Indonesia pada posisi yang bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Oleh karena itu, opsi keluar tetap menjadi alternatif apabila forum tersebut tidak dapat digunakan untuk mencapai tujuan perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Posisi tersebut memperlihatkan bahwa rekomendasi Kompas TV bersifat fleksibel: mempertahankan keterlibatan selama masih memberikan ruang pengaruh, tetapi membuka kemungkinan penarikan diri apabila kepentingan Indonesia dan Palestina tidak dapat diperjuangkan.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa *Republika.co.id* lebih banyak menawarkan solusi yang bersifat korektif dan struktural, yaitu memperbaiki mekanisme B.O.P, memperkuat peran PBB, memberikan representasi kepada Palestina, menghentikan agresi Israel, dan membuka kemungkinan Indonesia keluar dari BoP. Sementara itu, Kompas TV lebih menekankan solusi yang bersifat strategis dan diplomatik, yaitu mempertahankan keterlibatan Indonesia agar dapat menggunakan posisi tersebut untuk memengaruhi arah B.O.P dan memperjuangkan kepentingan Palestina dari dalam.

Meskipun demikian, terdapat persamaan mendasar di antara kedua media. Baik *Republika.co.id* maupun Kompas TV sama-sama menempatkan kemerdekaan Palestina, penghentian kekerasan, perlindungan masyarakat sipil, dan terciptanya perdamaian sebagai tujuan akhir penyelesaian konflik. Perbedaannya terletak pada strategi yang ditawarkan untuk mencapai tujuan tersebut. *Republika.co.id* lebih menekankan perlunya perubahan terhadap struktur dan mekanisme B.O.P serta penguatan mekanisme multilateral PBB, sedangkan Kompas TV lebih menekankan pentingnya mempertahankan ruang diplomasi Indonesia selama ruang tersebut masih dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Palestina.

Pada temuan peneliti tersebut dapat dikaitkan dengan penelitian Ivan Dermawan (2026), Didi Permadi (2026), dan Edy Sarwo (2026) yang menunjukkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace dapat dipahami sebagai langkah strategis agar Indonesia tidak berada di luar arena diplomasi. Hal ini sejalan dengan framing Kompas TV yang menempatkan keanggotaan Indonesia sebagai ruang untuk memengaruhi proses perdamaian dari dalam. Indonesia tidak hanya diposisikan sebagai penerima kebijakan, tetapi sebagai aktor yang dapat menggunakan keanggotaannya untuk menyampaikan kepentingan Palestina.

Selain itu, temuan penelitian ini juga selaras dengan penelitian Firman (2026) mengenai keterlibatan Indonesia dalam B.O.P sebagai arena kontestasi legitimasi konstitusional. Dalam konteks Treatment Recommendation, strategi mempertahankan keanggotaan dengan tetap memberikan batasan dan evaluasi menunjukkan bahwa keterlibatan Indonesia tidak dipahami sebagai keputusan yang bersifat mutlak, melainkan sebagai kebijakan yang harus terus dikawal agar tetap sesuai dengan amanat konstitusi, politik luar negeri bebas aktif, dan komitmen terhadap kemerdekaan Palestina.

Dengan demikian, pada elemen Treatment Recommendation, *Republika.co.id* lebih menonjolkan penguatan mekanisme multilateral, reformasi Board of Peace, penghentian agresi Israel, perlindungan warga sipil, serta opsi penarikan diri Indonesia apabila B.O.P tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Sementara itu, Kompas TV lebih menonjolkan

pemanfaatan keanggotaan Indonesia sebagai instrumen diplomasi, pengawalan kepentingan Palestina dari dalam forum, serta evaluasi berkelanjutan terhadap manfaat keanggotaan tersebut. Perbedaan ini menunjukkan bahwa *Republika.co.id* cenderung menawarkan solusi melalui pembenahan institusi dan penguatan mekanisme internasional, sedangkan *Kompas TV* lebih menekankan strategi keterlibatan aktif Indonesia dalam proses diplomasi internasional.

5) Konstruksi Framing *Republika.co.id* dan *Kompas.com* terhadap Sikap Board of Peace (BoP) dalam Kasus Genosida Palestina

Berdasarkan hasil analisis terhadap 15 berita *Republika.co.id* dan 15 berita *Kompas.com* menggunakan model framing Robert N. Entman, dapat disimpulkan bahwa kedua media sama-sama menempatkan Board of Peace (B.O.P) sebagai bagian penting dalam pemberitaan mengenai upaya penyelesaian konflik Palestina. Namun, keduanya memiliki kecenderungan framing yang berbeda dalam mengonstruksi keberadaan dan sikap B.O.P. *Republika.co.id* cenderung membangun framing yang lebih kritis terhadap B.O.P dengan menekankan ketidakefektifan lembaga tersebut dalam menjalankan fungsi perdamaian. Sementara itu, *Kompas.com* cenderung menyajikan persoalan B.O.P melalui perspektif yang lebih beragam dengan menampilkan perdebatan mengenai efektivitas, manfaat, risiko, serta posisi Indonesia dalam keanggotaan B.O.P.

Pada aspek *define problems*, *Republika.co.id* mendefinisikan persoalan utama sebagai ketidakmampuan B.O.P dalam menghentikan agresi Israel terhadap Palestina serta ketidaksesuaian antara tujuan pembentukan BoP dengan kondisi nyata di lapangan. Konflik diposisikan sebagai persoalan kegagalan lembaga perdamaian dalam menjalankan mandatnya. Sementara itu, *Kompas.com* mendefinisikan persoalan secara lebih luas, yaitu mengenai efektivitas B.O.P dalam menyelesaikan konflik Palestina serta dilema keterlibatan Indonesia di dalamnya. Permasalahan tidak hanya diarahkan pada kinerja B.O.P, tetapi juga pada perdebatan mengenai apakah keterlibatan Indonesia dapat menjadi sarana untuk memperjuangkan kepentingan Palestina atau justru menimbulkan persoalan diplomatik.

Pada aspek *diagnose causes*, *Republika.co.id* mengarahkan penyebab utama masalah pada lemahnya peran B.O.P, dominasi kepentingan politik Amerika Serikat dan Israel, serta tidak adanya tindakan nyata yang dilakukan B.O.P dalam menghentikan kekerasan di Palestina. *Republika.co.id* juga menampilkan berbagai kritik dari organisasi keagamaan, akademisi, dan tokoh masyarakat yang mempertanyakan keberadaan dan efektivitas B.O.P. Sementara itu, *Kompas.com* mengaitkan persoalan dengan struktur dan kepentingan politik yang terdapat dalam B.O.P, termasuk persoalan keterwakilan Palestina serta konsekuensi politik dan diplomatik bagi Indonesia. Dengan demikian, *Kompas.com* memperluas penyebab persoalan dengan tidak hanya melihat kelemahan B.O.P, tetapi juga mempertimbangkan posisi Indonesia dalam dinamika politik internasional.

Pada aspek *make moral judgement*, *Republika.co.id* memberikan penilaian moral bahwa tindakan Israel merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hukum internasional, sedangkan sikap pasif B.O.P dipandang sebagai bentuk kegagalan dalam mewujudkan perdamaian. Penilaian tersebut diperkuat melalui kutipan narasumber yang menilai keberadaan B.O.P belum memberikan manfaat nyata bagi penyelesaian konflik Palestina. *Kompas.com* juga menempatkan persoalan Palestina dalam perspektif kemanusiaan, tetapi memberikan ruang terhadap berbagai pandangan mengenai B.O.P. Keberadaan B.O.P dapat dipandang sebagai peluang diplomatik bagi Indonesia untuk memperjuangkan Palestina, tetapi juga dapat dipandang sebagai forum yang berisiko apabila tidak mampu memberikan manfaat nyata bagi rakyat Palestina.

Pada aspek *treatment recommendation*, *Republika.co.id* menampilkan berbagai rekomendasi berupa perlunya evaluasi terhadap keanggotaan Indonesia dalam B.O.P,

peningkatan tekanan diplomatik internasional terhadap Israel, serta dorongan agar lembaga perdamaian menjalankan fungsi secara independen dan berpihak pada prinsip keadilan serta kemanusiaan. Sementara itu, Kompas.com menampilkan rekomendasi yang lebih beragam, yaitu mempertahankan keterlibatan Indonesia apabila keanggotaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan Palestina, tetapi juga mempertimbangkan penarikan diri apabila B.O.P tidak mampu menjalankan fungsi perdamaian dan tidak memberikan manfaat nyata bagi Palestina.

Secara keseluruhan, konstruksi framing Republika.co.id menunjukkan kecenderungan kritis terhadap Board of Peace. Media tersebut mengonstruksi B.O.P sebagai lembaga yang belum mampu memenuhi tujuan pembentukannya sebagai instrumen perdamaian dunia. Framing tersebut dibangun melalui pemilihan isu, penggunaan sumber berita yang dominan mengkritik B.O.P, serta penekanan pada nilai kemanusiaan, keadilan, dan perlindungan terhadap rakyat Palestina. Dengan demikian, Republika.co.id mengonstruksi realitas bahwa keberadaan BoP belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyelesaian konflik Palestina dan justru menjadi objek kritik dari berbagai pihak.

Sementara itu, konstruksi framing Kompas.com cenderung kritis namun lebih beragam dalam menampilkan perspektif. Kompas.com tidak hanya menonjolkan kritik terhadap B.O.P, tetapi juga menghadirkan pandangan yang mendukung keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut. Oleh karena itu, B.O.P dikonstruksi sebagai lembaga yang efektivitas dan legitimasi politiknya masih diperdebatkan. Perdebatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan B.O.P dalam menyelesaikan konflik Palestina, tetapi juga dengan kepentingan politik luar negeri Indonesia dan peluang diplomatik yang dapat dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan Palestina.

Dengan demikian, terdapat persamaan sekaligus perbedaan dalam konstruksi framing kedua media. Persamaannya, Republika.co.id dan Kompas.com sama-sama menempatkan persoalan Palestina sebagai isu kemanusiaan serta memberikan perhatian terhadap efektivitas B.O.P dalam mewujudkan perdamaian. Perbedaannya terletak pada penekanan framing. Republika.co.id lebih kuat menempatkan B.O.P sebagai lembaga yang tidak efektif dan perlu dikritisi, sedangkan Kompas.com lebih menempatkan B.O.P sebagai forum diplomatik yang masih diperdebatkan manfaat, risiko, dan efektivitasnya bagi Palestina maupun Indonesia. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kedua media melakukan seleksi dan penonjolan aspek tertentu dalam mengonstruksi realitas mengenai Board of Peace dan keterlibatan Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik Palestina.

6) Implikasi Analisis Framing Republika.co.id dan Kompas.com dalam Perspektif Robert N. Entman

Berdasarkan hasil analisis framing terhadap 15 berita Republika.co.id dan 15 berita Kompas TV mengenai sikap Board of Peace (B.O.P) dalam kasus genosida Palestina tahun 2026, ditemukan bahwa kedua media memiliki kecenderungan dalam mengonstruksi realitas mengenai keberadaan dan peran B.O.P. Kedua media sama-sama menyoroti persoalan kemanusiaan di Palestina serta mempertanyakan sejauh mana B.O.P mampu menjalankan fungsi perdamaian secara efektif. Namun, terdapat perbedaan dalam penekanan dan sudut pandang yang digunakan dalam pemberitaan.

Kalau dikaitkan dengan teori framing Robert N. Entman, Republika.co.id dan Kompas TV melakukan proses seleksi serta penonjolan aspek tertentu dari suatu peristiwa. Pada elemen define problems, Republika.co.id cenderung mendefinisikan persoalan sebagai ketidakmampuan B.O.P dalam menghentikan kekerasan dan memberikan kontribusi nyata terhadap penyelesaian konflik Palestina. Sementara itu, Kompas TV mendefinisikan persoalan dengan menyoroti perkembangan konflik Palestina, sikap pemerintah Indonesia, serta perdebatan mengenai efektivitas dan keterlibatan Indonesia dalam B.O.P.

Pada elemen *diagnose causes*, Republika.co.id mengarahkan penyebab permasalahan pada lemahnya peran B.O.P, dominasi kepentingan politik Amerika Serikat dan Israel, serta minimnya tindakan nyata dalam menghentikan kekerasan terhadap Palestina. Kompas TV juga menyoroti faktor politik dan kepentingan negara-negara yang terlibat, tetapi pemberitaannya lebih banyak mengaitkan persoalan dengan dinamika kebijakan pemerintah Indonesia, perbedaan pandangan tokoh dan organisasi, serta posisi Indonesia dalam forum B.O.P.

Selanjutnya, pada elemen *make moral judgement*, Republika.co.id membangun penilaian moral dengan menekankan nilai keadilan, kemanusiaan, dan pembelaan terhadap rakyat Palestina. BoP dipandang secara kritis ketika dinilai tidak mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penghentian kekerasan. Sementara itu, Kompas TV menghadirkan penilaian melalui berbagai pandangan tokoh dan pihak yang terlibat dalam perdebatan mengenai B.O.P. Penilaian yang ditampilkan tidak hanya berkaitan dengan efektivitas B.O.P, tetapi juga dengan kepentingan Indonesia dalam memperjuangkan Palestina serta konsekuensi keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut.

Pada elemen *treatment recommendation*, Republika.co.id menampilkan rekomendasi berupa perlunya evaluasi terhadap keanggotaan Indonesia dalam B.O.P, peningkatan tekanan diplomatik internasional terhadap Israel, serta dorongan agar lembaga perdamaian mengambil langkah nyata berdasarkan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Kompas TV menampilkan rekomendasi yang berkaitan dengan perlunya pemerintah Indonesia mempertimbangkan kepentingan nasional dan kepentingan Palestina dalam menentukan sikap terhadap B.O.P, termasuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas keterlibatan Indonesia serta memastikan forum tersebut memberikan manfaat nyata bagi penyelesaian konflik.

Implikasi dari framing kedua media menunjukkan bahwa pemberitaan mengenai B.O.P tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga berperan dalam membentuk pemahaman khalayak mengenai efektivitas dan legitimasi B.O.P dalam penyelesaian konflik Palestina. Republika.co.id cenderung memperkuat persepsi bahwa B.O.P belum mampu menjalankan fungsi perdamaian secara efektif dan perlu mendapatkan evaluasi. Sementara itu, Kompas TV cenderung menghadirkan persoalan B.O.P dalam konteks yang lebih luas, terutama berkaitan dengan sikap pemerintah Indonesia, dinamika politik internasional, serta perbedaan pandangan mengenai manfaat dan risiko keterlibatan Indonesia.

Dengan demikian, hasil analisis terhadap 15 berita Republika.co.id dan 15 berita Kompas TV menunjukkan bahwa framing media memiliki implikasi terhadap cara khalayak memahami persoalan B.O.P dan konflik Palestina. Melalui proses seleksi, penonjolan isu, pemilihan narasumber, serta pemberian penilaian terhadap suatu peristiwa, kedua media membentuk konstruksi realitas yang dapat memengaruhi interpretasi masyarakat. Temuan ini sejalan dengan konsep framing Robert N. Entman bahwa media tidak sekadar menyampaikan fakta, tetapi memilih aspek tertentu dari realitas untuk ditonjolkan sehingga membentuk definisi masalah, penentuan penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi penyelesaian terhadap suatu persoalan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis framing media Republika.co.id dan Kompas TV terhadap sikap Board of Peace (BoP) dalam kasus genosida Palestina tahun 2026 dengan menggunakan model analisis framing Robert N. Entman, yang dilakukan terhadap 15 berita Republika.co.id dan 15 berita Kompas TV, dapat disimpulkan bahwa kedua media sama-sama menempatkan persoalan Palestina sebagai isu kemanusiaan yang

membutuhkan perhatian dan tindakan nyata dari berbagai pihak. Namun, terdapat perbedaan dalam cara kedua media mengonstruksi keberadaan dan sikap BoP.

Pada aspek *define problems*, *Republika.co.id* cenderung mendefinisikan persoalan sebagai ketidakmampuan BoP dalam menjalankan fungsi perdamaian dan menghentikan kekerasan yang terjadi di Palestina. Keberadaan BoP dipertanyakan karena konflik dan penderitaan masyarakat Palestina masih terus berlangsung. Sementara itu, *Kompas TV* mendefinisikan persoalan secara lebih luas dengan menyoroti efektivitas BoP, sikap pemerintah Indonesia, serta perdebatan mengenai keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut.

Pada aspek *diagnose causes*, *Republika.co.id* menempatkan lemahnya peran BoP, kepentingan politik Amerika Serikat dan Israel, serta tidak adanya tindakan nyata sebagai faktor yang menyebabkan tidak tercapainya perdamaian. Berbagai kritik dari tokoh agama, organisasi masyarakat, akademisi, dan pengamat turut memperkuat konstruksi tersebut. Sementara itu, *Kompas TV* lebih banyak mengaitkan persoalan dengan dinamika politik internasional, perbedaan pandangan mengenai keterlibatan Indonesia, serta kepentingan dan posisi Indonesia dalam *Board of Peace*.

Pada aspek *make moral judgement*, *Republika.co.id* memberikan penilaian moral dengan menekankan nilai kemanusiaan, keadilan, dan perlindungan terhadap rakyat Palestina. Sikap BoP yang dinilai belum mampu memberikan kontribusi nyata diposisikan sebagai persoalan yang dapat memengaruhi kredibilitas lembaga tersebut sebagai instrumen perdamaian. *Kompas TV* juga menampilkan nilai kemanusiaan dalam pemberitaannya, tetapi memberikan ruang terhadap berbagai pandangan mengenai BoP, baik yang mendukung keterlibatan Indonesia maupun yang mempertanyakan efektivitas dan manfaatnya.

Pada aspek *treatment recommendation*, *Republika.co.id* menampilkan rekomendasi berupa desakan agar BoP mengambil langkah yang lebih tegas dalam menghentikan agresi Israel, melakukan evaluasi terhadap peran dan mekanisme kerjanya, serta mendorong masyarakat internasional memberikan perlindungan nyata kepada rakyat Palestina. Selain itu, muncul pula dorongan agar Indonesia mempertimbangkan kembali keterlibatannya dalam BoP apabila lembaga tersebut tidak mampu menjalankan tujuan perdamaian secara adil. Sementara itu, *Kompas TV* menampilkan rekomendasi yang berkaitan dengan perlunya pemerintah Indonesia mengevaluasi keterlibatannya dalam BoP dan memastikan bahwa keanggotaan tersebut dapat memberikan manfaat bagi kepentingan Palestina maupun kepentingan Indonesia.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa *Republika.co.id* cenderung membangun framing yang lebih kritis terhadap *Board of Peace*, dengan menonjolkan ketidakefektifan, lemahnya peran, dan persoalan kepentingan politik yang memengaruhi lembaga tersebut. Sementara itu, *Kompas TV* cenderung membangun framing yang lebih kontekstual, dengan menampilkan persoalan BoP dalam kaitannya dengan dinamika politik internasional, kebijakan pemerintah Indonesia, serta perbedaan pandangan mengenai manfaat dan risiko keterlibatan Indonesia.

Dengan demikian, kedua media memiliki persamaan dalam menempatkan persoalan Palestina sebagai isu kemanusiaan dan dalam mempertanyakan efektivitas BoP, tetapi berbeda dalam penekanan pemberitaan. *Republika.co.id* lebih kuat mengonstruksi BoP sebagai lembaga yang belum mampu menjalankan fungsi perdamaian, sedangkan *Kompas TV* lebih menekankan BoP sebagai forum yang masih menjadi ruang perdebatan politik dan diplomasi. Temuan ini menunjukkan bahwa media melalui proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dapat membentuk cara khalayak memahami suatu persoalan, sebagaimana dijelaskan dalam model framing Robert N. Entman.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis framing media Republika.co.id dan Kompas TV terhadap sikap Board of Peace (BoP) dalam kasus genosida Palestina tahun 2026, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi Media Republika.co.id dan Kompas TV

Republika.co.id dan Kompas TV diharapkan dapat terus mempertahankan komitmen terhadap penyajian berita yang akurat, faktual, dan sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik. Dalam memberitakan isu konflik internasional seperti Palestina dan Board of Peace, kedua media diharapkan dapat menghadirkan berbagai perspektif dari pihak-pihak yang berkaitan sehingga masyarakat memperoleh informasi yang lebih komprehensif.

Media juga diharapkan tetap memperhatikan keseimbangan dalam pemilihan narasumber dan penyajian fakta. Meskipun setiap media memiliki karakteristik dan kebijakan redaksional masing-masing, keberagaman sumber dapat membantu pembaca memahami kompleksitas persoalan tanpa hanya bergantung pada satu sudut pandang. Dengan demikian, media dapat menjalankan fungsi informatif, edukatif, dan kontrol sosial secara lebih optimal.

2. Bagi Masyarakat atau Pembaca

Masyarakat diharapkan dapat bersikap lebih kritis dalam mengonsumsi pemberitaan mengenai konflik Palestina dan Board of Peace. Pembaca perlu memahami bahwa setiap media memiliki cara yang berbeda dalam memilih, menyeleksi, dan menonjolkan informasi. Oleh karena itu, masyarakat sebaiknya tidak hanya mengandalkan satu sumber berita, tetapi membandingkan informasi dari beberapa media yang kredibel.

Kemampuan membandingkan pemberitaan dari Republika.co.id, Kompas TV, maupun media lainnya dapat membantu masyarakat memahami adanya perbedaan sudut pandang dalam pemberitaan. Dengan sikap kritis tersebut, masyarakat dapat memilah informasi secara lebih objektif dan menghindari terbentuknya pemahaman yang hanya didasarkan pada satu konstruksi media.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada objek dan periode penelitian, yaitu 15 berita Republika.co.id dan 15 berita Kompas TV mengenai sikap Board of Peace dalam kasus genosida Palestina tahun 2026. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan melibatkan lebih banyak media, baik media nasional maupun internasional, sehingga dapat diketahui perbedaan konstruksi realitas yang dibangun oleh berbagai media.

Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan model framing lainnya, seperti model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, William A. Gamson, maupun pendekatan analisis wacana kritis. Penggunaan pendekatan yang berbeda diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih luas mengenai konstruksi media terhadap isu konflik, politik internasional, diplomasi, dan persoalan kemanusiaan.

4. Bagi Pengembangan Ilmu Komunikasi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu komunikasi, khususnya komunikasi massa dan analisis framing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga berperan dalam mengonstruksi realitas sosial melalui proses pemilihan isu, pemilihan narasumber, penekanan fakta, serta penyusunan narasi pemberitaan.

Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa dan peneliti yang ingin mengkaji konstruksi media terhadap isu politik, konflik internasional, diplomasi, maupun persoalan kemanusiaan. Dengan semakin banyaknya penelitian mengenai framing

media, diharapkan kajian komunikasi massa dapat berkembang dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara media, realitas sosial, dan pembentukan persepsi masyarakat.

Secara keseluruhan, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis dalam memahami bagaimana media mengonstruksi realitas melalui pemberitaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat tema serupa dengan objek, periode, maupun pendekatan yang lebih luas sehingga menghasilkan kajian mengenai framing media yang semakin komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Q. (n.d.). Teori komunikasi media massa. 1996.
- Fitryan G. Dennis. (2023). Fitryan G. Dennis, Bekerja , h. 23 1 17. 17–34.
- Hafied Cangara. (2021). Bersifat melembaga, artinya pihak yang mengelola media terdiri dari banyak orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan sampai pada penyajian informasi. 19–53.
- Ii, B. A. B., & Pustaka, T. (2018). Berita. 13–20.
- Ii, B. A. B., & Pustaka, T. (2021). No Title. 8–16.
- Iii, B. A. B. (2021). Bab iii metode penelitian 3.1. 33–41.
- Iii, B. A. B., & Penelitian, M. (2016). No Title. 1–5.
- Iii, I. S. (2020). No Title. Ina Salmah, 2020, 1–17.
- Indriyani, M. (2020). Efektivitas Penggunaan Media Online Tirto.Id terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Berita Livi Zheng. Jurnal Studi Jurnalistik, 2(2), 157–167. <https://doi.org/10.15408/jsj.v2i2.15065>
- Jolanda Olivia & Setiawan. (2023). 1 , 2 1,2. 9(9), 492–498.
- Kustiawan, W., Siregar, F. K., Alwiyah, S., & Lubis, R. A. (2022). Komunikasi massa. 11(1), 1–9.
- M. Romli, A. S. (2019). John M. Echols Dan Hasan Shadily, English Indonesia Dictionary , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 360. 1.
- Metodologi, D. A. N. (2019). MENGENAL ANALISIS FRAMING : TINJUAN SEJARAH. 1(2).
- Nirwana, M. A., Genosida, K., & Internasional, H. (2020). DALAM KONTEKS HUKUM INTERNASIONAL. 1–13.
- Qudratullah. (2016). Peran dan fungsi komunikasi massa. 41–46.
- Rachmat Kriyantono. (2022). 53 52 42. 42–47.
- Abdullah, M. Q. (n.d.). Teori komunikasi media massa. 1996.
- Fitryan G. Dennis. (2023). Fitryan G. Dennis, Bekerja , h. 23 1 17. 17–34.
- Hafied Cangara. (2021). Bersifat melembaga, artinya pihak yang mengelola media terdiri dari banyak orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan sampai pada penyajian informasi. 19–53.
- Ii, B. A. B., & Pustaka, T. (2018). Berita. 13–20.
- Ii, B. A. B., & Pustaka, T. (2021). No Title. 8–16.
- Iii, B. A. B. (2021). Bab iii metode penelitian 3.1. 33–41.
- Iii, B. A. B., & Penelitian, M. (2016). No Title. 1–5.
- Iii, I. S. (2020). No Title. Ina Salmah, 2020, 1–17.
- Indriyani, M. (2020). Efektivitas Penggunaan Media Online Tirto.Id terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Berita Livi Zheng. Jurnal Studi Jurnalistik, 2(2), 157–167. <https://doi.org/10.15408/jsj.v2i2.15065>
- Jolanda Olivia & Setiawan. (2023). 1 , 2 1,2. 9(9), 492–498.
- Kustiawan, W., Siregar, F. K., Alwiyah, S., & Lubis, R. A. (2022). Komunikasi massa. 11(1), 1–9.
- M. Romli, A. S. (2019). John M. Echols Dan Hasan Shadily, English Indonesia Dictionary , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 360. 1.
- Metodologi, D. A. N. (2019). MENGENAL ANALISIS FRAMING : TINJUAN SEJARAH. 1(2).
- Nirwana, M. A., Genosida, K., & Internasional, H. (2020). DALAM KONTEKS HUKUM INTERNASIONAL. 1–13.

Quadratullah. (2016). Peran dan fungsi komunikasi massa. 41–46.
Rachmat Kriyantono. (2022). 53 52 42. 42–47.